

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Juni 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 2,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,74. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 12,3 persen; kelompok pendidikan sebesar 4,16 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,36 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,88 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,68 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,66 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,58 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,73 persen; kelompok transportasi sebesar 0,09 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,24 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,59 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Juni 2025 sebesar 0,60 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) di bulan Juni 2025 sebesar 1,59 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan di 3 kabupaten/kota IHK di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Juni 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,51 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,08 pada Juni 2024 menjadi 108,74 pada Juni 2025. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,60 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,59 persen.

Berdasarkan press release BPS pada tanggal 1 Juli 2025, inflasi nasional untuk inflasi bulan ke bulan (*Juni 2025 terhadap Mei 2025*) berada pada angka 0,19%. Sedangkan untuk inflasi Nasional tahun ke tahun (*Juni 2025 terhadap Juni 2024*) berada pada angka 1,87%. Untuk inflasi bulan ke bulan (*Juni 2025 terhadap Mei 2025*) Provinsi NTB berada pada angka 0,60%. Sedangkan untuk inflasi Provinsi NTB tahun ke tahun (*Juni 2025 terhadap Juni 2024*) Provinsi NTB berada pada angka 2,51%. Inflasi bulan ke bulan untuk Kota Mataram sebesar 0,43%. Sedangkan Inflasi tahun ke tahun sebesar 2,14%. Untuk Kabupaten Lombok Barat angka inflasi mengacu pada Kota Mataram.

Andil beberapa komoditas terhadap inflasi/deflasi Juni 2025 (m-to-m) pada Kota Mataram (Kabupaten Lombok Barat mengacu pada Kota Mataram) untuk inflasi : Tomat, cabai rawit, beras, nasi dengan lauk, dan bawang merah. Sedangkan untuk komoditas penyumbang deflasi Juni 2025 diantaranya daging ayam ras, bawang putih, ikan tongkol, Angkatan laut, dan detergent cair.

#### **DAFTAR HARGA KEBUTUHAN POKOK STRATEGIS BERDASARKAN DATA SP2KP BULAN APRIL, MEI, DAN JUNI 2025 PADA KAB. LOMBOK BARAT**

NO	JENIS BARANG	SATUAN	BULAN APRIL	MEI	JUNI	KETERANGAN
1	Beras Cap IR (Medium)	Kg	12.500	13.000	13.111	Stabil
2	Beras Cap Mataram (Premium)	Kg	13.531	13.500	14.083	Stabil

3	Beras Cap Padiku (Premium)	Kg	13.531	13.500	14.083	Stabil
4	Beras SPHP Bulog	Kg	12.000			Stabil
5	Kedelai Lokal,1 kg	Kg	15.000	15.000	15.000	Stabil
6	Kedelai Impor,1 kg	Kg	14.000	14.000	14.000	Stabil
7	Cabai Merah Keriting,1 kg	Kg	50.938	43.765	41.889	Tidak Stabil
8	Cabai Merah Besar,1 kg	Kg	26.688	22.235	24.111	Tidak Stabil
9	Cabai Rawit Merah,1 kg	Kg	76.188	35.176	54.333	Tidak Stabil
10	Cabai Rawit Hijau,1 kg	Kg	25.000	21.529	18.444	Tidak Stabil
11	Bawang Merah,1 kg	Kg	47.313	34.353	38.611	Tidak Stabil
12	Gula Pasir Curah, 1kg	Kg	17.313	18.000	17.056	Stabil
13	Gula Pasir Kemasan, 1kg	Kg	18.000	18.000	18.000	Stabil
14	Minyak Goreng Curah,1 lt	Kg	18.500	18.500	18.222	Stabil
15	Minyak Goreng Kemasan Premium,1 lt	Kg	20.000	20.000	19.389	Stabil
16	Minyakita,1 lt	Kg	17.000	17.000	16.639	Stabil
17	Tepung Terigu,1 kg	Kg	13.000	13.000	13.000	Stabil
18	Daging Ayam Ras Karkas,1 kg	Kg	35.625	35.000	34.611	Stabil
19	Telur Ayam Ras,1 kg	Kg	28.766	29.333	29.463	Stabil
20	Daging Sapi Paha Belakang,1 kg	Kg	125.000	125.000	126.111	Stabil
21	Daging Sapi Tetelan,1 kg	Kg	65.000	65.000	61.667	Stabil
22	Ikan Bandeng,1 kg	Kg	40.000	38.235	39.722	Stabil
23	Ikan Tongkol,1 kg	Kg	20.938	25.294	22.222	Tidak Stabil
24	Ikan Teri,1 kg	Kg	80.000	80.000	80.000	Stabil
25	Bawang Putih Honan,1 kg	Kg	39.563	40.000	38.222	Stabil
26	Bawang Putih Kating,1 kg	Kg	39.000	39.000	39.000	Stabil

27	Garam Halus,1 kg	Kg	10.000	10.000	10.000	Stabil
28	Susu Kental Manis, 370 gr	Kg	12.000	12.000	12.000	Stabil
29	Susu Bubuk (Setara Dancow),400 gr	Kg	40.000	40.000	42.000	Stabil
30	Udang Basah,1 kg	Kg	60.000	61.765	61.944	Stabil
31	Tomat,1 kg	Kg	8.813	13.882	23.333	Tidak Stabil
32	Kentang Sedang,1 kg	Kg	18.000	18.000	18.000	stabil
33	Sawi Hijau,1 kg	Kg	8.000	8.000	8.000	stabil
34	Kangkung,1 kg	Kg	6.063	6.000	6.000	stabil
35	Ketimun Sedang,1 kg	Kg	5.438	5.353	8.000	Tidak Stabil
36	Kacang Panjang,1 kg	Kg	7.500	8.000	8.000	Stabil
37	Ayam Kampung Utuh,1 ekor	Kg	65.000	65.000	65.000	Stabil
38	Telur Ayam Kampung,1 kg	Kg	54.000	54.000	54.000	Stabil

***Sumber Data Disperindag Kab. Lombok Barat***

**GRAFIK INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (IPH) KAB. LOMBOK BARAT TANGGAL**

**1 APRIL S/D 30 JUNI 2025**

Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang terjadi pada M5 bulan Mei berada pada angka -5,17% yang mengalami kenaikan menjadi 1,28% pada M1 Juni yang disebabkan antara lain :

- Deflasi terjadi akibat penurunan harga komoditas cabai merah dan cabai rawit merah. Penurunan harga kedua komoditas tersebut cukup signifikan, yang diduga disebabkan oleh melimpahnya pasokan, antara lain karena adanya pembelian dari luar daerah serta pencampuran dengan komoditas lokal.
- Kenaikan harga beras perlu menjadi perhatian serius, terutama karena kondisi ini terjadi di tengah masa panen padi yang semestinya dapat menekan harga melalui peningkatan pasokan. Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi ketidakseimbangan antara distribusi dan permintaan. Selain itu, kenaikan harga juga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan beras nasional. Selain itu, peningkatan jemaah haji, yang turut mendorong permintaan terhadap komoditas beras, bawang putih, telur dan gula
- Berdasarkan kesepakatan pemerintah



kerja ekstra dalam penstabilan harga komoditas.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang terjadi pada M3 bulan Juni berada pada angka 1,75% dan mengalami kenaikan M4 Juni menjadi 2,44% yang disebabkan antara lain:

- Inflasi terjadi akibat kenaikan harga komoditas cabai dikarenakan cuaca yang tidak menentu sehingga pasokan cabai berkurang. Terutama cabai rawit merah dan cabai merah besar yang perlu menjadi perhatian
- Kenaikan harga telur ayam perlu di waspadai mengingat stok/pasokan kecenderungan menurun. Sehingga perlu strategi untuk memperbanyak stok baik dari luar daerah maupun lokal.
- Berdasarkan simulasi perhitungan melalui data IPH (month to month) didapatkan simulasi hasil YoY IPH Kabupaten Lombok Barat pada Bulan Mei sudah dibawah target nasional (<3%). Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dari pengendalian Inflasi. Apabila IPH pada akhir Juni (M-4 Juni) berada pada rentang deflasi -0,5 s/d inflasi 1.4 maka IPH YoY Lombok Barat dalam rentang aman (on the track) mengikuti target Nasional
- Berdasarkan kesepakatan pemerintah melalui TPIP ditetapkan sebagai berikut :Target Inflasi Nasional Tahun 2025 Desember YoY sebesar +2,5% atau 1,5% - 3,5 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi komoditas bergejolak (Volatile Food) disepakati dalam interval 3% - 5% untuk Inflasi YoY Desember 2025.

Berdasarkan hasil pantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Triwulan II tahun 2025 (April-Juni), perkembangan harga barang kebutuhan pokok di Pasar Gerung dan Pasar Kediri menunjukkan dinamika yang bervariasi, dipengaruhi oleh faktor musiman, distribusi barang, serta tingkat permintaan masyarakat. Secara umum, harga beberapa komoditas mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan tetap dalam kondisi terkendali. Selama periode ini terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti cabai rawit merah, bawang merah, cabe rawit hijau, cabe merah keriting, cabe merah besar, dan ikan tongkol, harga cabai rawit merah terutama dipengaruhi oleh faktor cuaca yang kurang mendukung pada awal musim tanam, sehingga berdampak pada jumlah pasokan ke pasar. Sementara itu, harga bawang merah naik karena berkurangnya pasokan dari sentra produksi utama di luar daerah, kenaikan harga di beberapa komoditi ini juga disebabkan adanya kegiatan hari besar keagamaan hari raya Idul adha. Dari sisi lain komoditas beras, gula pasir, dan minyak goreng kemasan relatif stabil selama triwulan ini. Stabilitas ini tercapai berkat adanya pengawasan distribusi serta dukungan pasokan dari pemerintah pusat dan daerah. Harga telur ayam ras dan tepung terigu juga menunjukkan tren yang cenderung stabil, dengan fluktuasi harga dalam batas yang wajar. Adapun beberapa komoditas seperti ikan segar dan sayur-mayur mengalami penurunan harga pada pertengahan hingga akhir Juni, seiring dengan meningkatnya hasil panen lokal dan melimpahnya pasokan dari nelayan sekitar. Secara umum, kondisi harga barang kebutuhan pokok di Pasar Gerung dan Pasar Kediri pada Triwulan II masih tergolong terjaga dan stabil, meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga akibat faktor musiman dan distribusi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan stakeholder terkait guna menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang di pasar.

Berdasarkan hasil pantauan Dinas Ketahanan Pangan bulan April pada minggu ke I sampai dengan Mei minggu ke IV Tahun 2025 harga bawang merah sedikit demi sedikit mulai mengalami penurunan harga dan mulai mengalami kenaikan haraga lagi mulai dari Bulan Juni Minggu I sampai saat ini di kisaran harga 30.000-35.000/Kg. Kenaikan harga harga bawang

merah disebabkan karena pasokan yang kurang karena iklim, permintaan yang banyak karena menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) seperti Hari Raya Idul Adha. Di Minggu ke I bulan Juni sampai dengan saat ini cabai rawit juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi hampir menginjak 70.000/kg. Sedangkan untuk komoditas pangan yang lain dengan harga yang masih stabil dan masih terjangkau untuk daya beli masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan tim survey harga pasar Kabupaten Lombok Barat, selama triwulan kedua Tahun 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan selama triwulan II Tahun 2025 harga komoditi ikan air tawar relatif stabil, kenaikan harga terjadi pada awal Bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Harga Ikan Nila terjadi kenaikan sebesar Rp.2000/kg, yang semula harga Rp. 30.000/kg menjadi Rp. 32.000/Kg, hal ini disebabkan karena statmen pasar dan momen Hari Raya Idul Fitri. Setelah Hari Raya harga Ikan akan normal kembali dikisaran Rp.28.000- Rp. 30.000/kg. Harga ikan tongkol mengalami kenaikan harga pada akhir Bulan Mei sampai Juni, harga ikan tongkol segar per Kilogram berkisar diharga Rp. 15.000- Rp. 20.000, sedangkan ikan kembung per Kilogram Rp. 40.000-Rp.45.000. Hal ini disebabkan berkurangnya pasokan karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat (musim Badai siklon) sehingga berkurangnya hasil tangkapan. Harga pindang ikan tongkol per keranjang dipatok pada harga Rp. 30.000 (isi 5 ekor). Harga udang segar ukuran sedang (Size 90-100) berkisar RP.60.000-Rp.65.000 per kg sedangkan ukuran besar (Size 70-80) harga berkisar Rp.72.000-Rp.75.000 per kg. Ketersediaan Udang segar di Pasar Gerung sempat berkurang karena terjadi kenaikan harga ditingkat Distributor.

Berdasarkan hasil pantauan Dinas Pertanian di triwulan II komoditi Beras harganya cukup signifikan, dengan rata rata harga RP 14.000,- (Empat Belas Ribu Rupiah) sampai Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah). Di Kabupaten Lombok Barat setiap hari ada panen padi namun kondisi saat ini belum mampu menurunkan harga beras. Hal ini disebabkan oleh Harga GKP (Gabah Kering Panen) dari petani ke pengepul/pelaku usaha beras masih cukup tinggi dimana dari bulan April – Juni 2025 rata - rata GKP masih diangka Rp 7.300,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah)/kg diatas HPP yang ditetapkan Pemerintah. Tingginya harga cabe di sebabkan oleh gagalnya program bantuan Cabe ke Masyarakat yang berkisar antara 95% disebabkan oleh Intensitas curah hujan yang tinggi serta hanyutnya tanaman cabai dilahan sawah yang disebabkan oleh banjir. Walaupun harga cabe di pasar Tradisional Kabupaten Lombok Barat terbilang tinggi Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 3 bulan terakhir namun stock cabai di pasaran cukup tersedia. Tingginya harga cabai tidak terlalu berpengaruh pada masyarakat karena Pemerintah Kabupaten Lombok Barat khususnya Pasar Tani/Tenten Tani Pertanian gencar melakukan pasar murah (OPM) ke desa-desa yang tidak menjadi sentra cabai dengan harga dibawah harga pasar/harga jual petani.

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kabupaten Lombok Barat masih banyak bergantung pada pasokan bahan pokok dari luar daerah, seperti Kabupaten tetangga bahkan dari Pulau Bali atau Jawa.

Hal ini menyebabkan :

- Harga bahan pokok sangat rentan terhadap gangguan distribusi (cuaca, infrastruktur, dan biaya transportasi).

Kenaikan harga bahan bakar langsung berdampak pada harga komoditas

2. Ketergantungan terhadap Musim (Musiman)

- Produksi pangan sangat bergantung pada musim tanam yang belum sepenuhnya dikelola dengan sistem irigasi modern.
- Ketika musim kemarau, produksi menurun, memicu kenaikan harga.

3. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian harga pada Dinas Pertanian terkait komoditas tersebut diatas antara lain :

- a. Bahwa pada musim panen padi saat ini ( April-Juni) rata-rata GKP Petani dijual dengan harga 7.000,00 s/d 7.300,00/kg- diatas HPP, hal ini mempengaruhi tingginya harga beras berada di harga Rp 14.000 s/d 15.000,- dipasar tradisional
- b. Fluktuasi harga cabai kurangnya produksi karena Gagalnya program bantuan cabai kemasyarakatan yang di tanam pada bulan Desember 2025 disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan tanaman cabai dilahan sawah dihanyutkan oleh banjir sekitar 95%.
- c. Kurangnya Pasokan cabe dan bawang merah dari petani baik dari petani dalam Kabupaten dan luar daerah terkendala dengan cuaca ekstrim dan banjir sehingga harga cabai rawit merah dan bawang merah tetap berada diambang batas atas harga normal.
- d. Dukungan anggaran APBD untuk kegiatan pengembangan komoditi Bawang berkurang terkait budidaya, pasca panen serta dukungan SDM kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
- e. Kurangnya intensitas koordinasi dan komunikasi dengan stake holder terkait seperti pengepul, pengusaha dan aparat penegak hukum, ketika harga komoditi melambung tinggi, tindakan pemantauan dan pengawasan dilapangan ditingkatkan namun kurangnya kepedulian Pemerintah Daerah saat harga cabai anjlok (harga tidak menguntungkan petani).

4. Permasalahan utama pengendalian inflasi Daerah diantaranya:

- a. Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan, permasalahan daerah yang memiliki tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi.
- b. Kesenjangan informasi dan distorsi struktur pasar, kesenjangan informasi antar pelaku ditengah panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga dipasar
- c. Produktivitas pangan yang berkurang / tidak optimal karena adanya kendala iklim yang tidak menentu khususnya di Kabupaten Lombok Barat.

5. Kenaikan harga komoditas perikanan disebabkan karena berkurangnya ketersediaan ikan di pasar terutama jenis-jenis ikan hasil tangkapan seperti ikan tongkol dan ikan kembung. Berkurangnya ketersediaan disebabkan berkurangnya hasil tangkapan karena faktor musim dan kondisi cuaca. sedangkan untuk perikanan hasil budidaya relatif stabil hal ini disebabkan terjaminnya ketersediaan ikan dan stabilnya harga dan pasokan pakan ikan. Kenaikan harga udang segar/udang basah disebabkan karena kenaikan harga di pihak distributor atau udang berasal dari wilayah luar Lombok (tambahan biaya transport).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

**UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2025**

## I. KETERJANGKAUAN HARGA

### ◦ MELAKUKAN OPERASI PASAR/GERAKAN PANGAN MURAH/PASAR TANI

- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM)/Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Tani bersinergi dengan Bank Indonesia (BI), Bulog dan OPD terkait secara berkala.
- Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pakan sebagai penyebab utama kenaikan harga ikan khususnya ikan budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tetap melakukan pemantauan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan di masing-masing wilayah. Selain itu untuk ketersediaan komoditas ikan pemantauan dilakukan di Cold Storage yang ada di Dusun Ireng Desa Jati Sela Kecamatan Gunung Sari dan sentra pemindangan di Kecamatan Batulayar.
- Untuk kegiatan survey harga pasar dilakukan setiap hari oleh Disperindag, Dikpangan dan Diperta Kab. Lobar pada pada Pasar Kediri dan Pasar Gerung. Melaporkan pergerakan harga komoditas rutin melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) untuk memonitor Perkembangan Harga secara harian. Data atas laporan indeks perkembangan harga (IPH) yang digunakan sebagai laporan Ke Kemendagri adalah data yang diperoleh dari Disperindag Kab.Lobar yang kemudian akan di laporkan ke Itjen Kemendagri oleh Inspektorat. Data terkait indeks perkembangan harga (IPH) Kabupaten Lombok Barat dapat diakses melalui <http://s.bps.go.id/iphlobar>. Dan untuk update harga Kabupaten Lombok Barat dapat diakses melalui <http://s.bps.go.id/updatepasarlobar>. Selain itu dapat juga diakses melalui <https://silakniki.lombokbaratkab.go.id/>

### JADWAL PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH (OPM), GERAKAN PANGAN MURAH (GPM) DAN TEN TEN TANI BULAN APRIL S/D JUNI 2025

NO	LOKASI	KECAMATAN	TANGGAL KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Halaman Kantor Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat	Labuapi	9 Mei 2025	Ten Ten Tani
2.	Taman Kota Gerung (Kegiatan CFN)	Gerung	10 Mei 2025	Ten Ten Tani
3.	Dusun Rumbuk Desa Batu M ekar Kec.Lingsar	Lingsar	15 Mei 2025	Ten Ten Tani
4.	Desa Suka Makmur	Gerung	24 Juni 2025	Bekrjasama dengan Perdagangan Provinsi
5.	Desa Labuapi	Labuapi	25 Juni 2025	Bekrjasama dengan Perdagangan Provinsi
6.	Desa Montong Are	Kediri	26 Juni 2025	Bekrjasama dengan Perdagangan Provinsi

## II.KETERSEDIAAN PASOKAN

### ◦ MELAKSANAKAN SIDAK PASAR DAN SIDAK GUDANG DISTRIBUTOR

- Sebagai respon cepat atas laporan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg di



sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Barat melakukan kegiatan inspeksi mendadak (sidak) di tiga SPPBE yaitu SPPBE PT. Om Agus, SPPBE PT. Menara Energygas dan SPPBE PT. Harapan Jaya Mandiri tim dari Disperindag juga melakukan sidak ke beberapa agen dan pangkalan LPG 3 kg yang tersebar di berbagai kecamatan.

- Sidak ini dilaksanakan untuk mengecek langsung kondisi stok dan distribusi gas LPG 3 kg serta mengidentifikasi penyebab terjadinya kelangkaan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Tim Disperindag turun ke lapangan bekerja sama dengan pihak Pertamina serta aparat desa setempat.

#### **JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SIDAK PASAR DAN SIDAK GUDANG DISTRIBUTOR BULAN APRIL S/D JUNI 2025**

<b>NO</b>	<b>TANGGAL SIDAK</b>	<b>LOKASI SIDAK</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	04 Juni 2025	-Pasar Kediri -Gudang Indomaret	Kediri Batu Jai Lombok Tengah	Sidak/Pengawasan
2	05 Juni 2025	-Pasar Gerung -PT.Lombok Menara Energygas	Gerung Kuripan	Sidak/Pengawasan
3	16 Juni 2025	-PT.Om Agus -PT.Harapan Jaya Utama	Lembar Keru	Sidak/Pengawasan
4	17 Juni 2025	-Agen dan Pangkalan wilayah Sandik	Sandik Batulayar	Sidak/Pengawasan

#### **◦ OPERASI PASAR PENYALURAN BERAS SPHP**

Bulog melaksanakan kerjasama dengan pedagang selaku mitra bulog untuk menyalurkan beras SPHP di 4 Pasar kecamatan dan Pasar Gerung menjadi salah satu acuan untuk melaksanakan Operasi Pasar khusus untuk penyaluran beras SPHP dengan melibatkan Pimpinan beserta Kepala OPD yang tergabung dalam Tim TPID Tingkat Kab. Lobar. Pendropan Beras SPHP dilaksanakan 2 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari senin dan kamis dengan jumlah 1,5 - 2 ton per satu kali dropping untuk tiap mitra bulog.

### **III. KELANCARAN DISTRIBUSI**

#### **1. Pengaturan dan pengawasan kendaraan angkutan barang**

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari, mulai dari April s/d Juni 2025, adapun personil yang dilibatkan diganti setiap bulannya. Setiap bulannya, jumlah personil yang dilibatkan sebanyak 9 orang dengan lokus kegiatan pada Tempat Parkir Khusus Segenter. Penertiban ini bertujuan untuk memberikan ruang parkir bagi kendaraan barang yang notabene adalah kendaraan besar agar tidak melakukan parkir di bahu jalan. Adapun kendaraan yang parkir sebagian besar adalah kendaraan yang akan menuju Pelabuhan Lembar maupun pelabuhan Gili Mas dengan tarif yang sangat terjangkau. Ketersediaan ruang parkir ini cukup penting dalam rangka memperlancar arus lalu lintas terlebih pada ruas jalan utama menuju Pelabuhan. Dengan lancarnya arus lalu lintas, maka arus

distribusi barang, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder menjadi lancar juga, tiba tepat waktu dan mengurangi biaya distribusi. Setiap harinya, personil mencatat/mendata kendaraan yang melakukan parkir di Segenter. Adapun jumlah kendaraan angkutan barang yang parkir pada Tempat Parkir Khusus Segenter dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2025 adalah sebanyak 1522 unit.

Pada bulan Juni 2025 Dinas Perhubungan bersama dengan pihak Polres Lombok Barat melaksanakan sosialisasi terkait aksi premanisme yang ditujukan kepada sopir angkutan barang yang sedang melakukan parkir PADA Tempat khusus parkir Segenter. Hal ini bertujuan sebagai upaya preventif dalam menghindari aksi semacamnya sehingga distribusi barang maupun komoditas pangan lainnya tetap lancar dan bebas hambatan.

## **2. Pengujian Laik Jalan Kendaraan**

Adapun aktifitas yang dilaksanakan antara lain:

- Pelaksanaan uji berkala pada kendaraan angkutan orang dan barang
- Pemberian rekomendasi laik jalan bagi kendaraan yang memenuhi syarat keamanan dan keselamatan
- Pengawasan angkutan orang dan barang yang tidak laik jalan

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan setiap hari Senin s/d Sabtu di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Dampak yang ditimbulkan terhadap pengendalian inflasi adalah Memastikan kendaraan angkutan orang dan barang yang beroperasi sudah laik jalan, sehingga resiko kecelakaan lalu lintas yang menghamat distribusi barang dapat dikurangi.

## **3. Pengawasan lalu lintas dan penertiban areal terminal**

Lokasi Pelaksanaan penertiban terminal adalah pada sejumlah terminal di wilayah Kabupaten Lombok Barat, diantaranya :

- Shelter Narmada
- Shelter Gunungsari
- Shelter Keru
- Shelter Kediri

Adapun aktifitas yang dilaksanakan adalah :

- Penertiban areal terminal untuk kelancaran arus keluar masuk kendaraan angkutan penumpang dan barang menuju terminal dan pasar
- Pengawasan kelancaran lalu lintas pada seluruh terminal, terlebih pada hari pasaran maupun menjelang Hari Raya

## **IV. KOMUNIKASI EFEKTIF**

- Penyelenggaraan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB untuk membahas tantangan dan strategi tindak lanjut pengendalian inflasi serta koordinasi ketersediaan bahan pokok terutama menjelang.
- Melakukan rapat koordinasi dan strategi lintas sektoral dalam upaya mengendalikan tekanan inflasi pada sejumlah komoditas pangan strategis.
- Mengikuti kegiatan Capacity Building dan Workshop TPID

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Keterbatasan Anggaran bersumber APBD dalam pelaksanaan pengendalian Inflasi, terutama terhadap program subsidi transportasi untuk mendukung kegiatan distribusi dalam pelaksanaan operasi pasar/Gerakan pangan/Pasar tani.
- Masih terdapat kendala dalam pemeliharaan jaringan terhadap pengembangan Web Silakniki (sistem pelaporan harga terkini) untuk memberikan informasi terkait harga dan kegiatan dalam pengendalian inflasi serta melakukan bimtek kepada tenaga operator web silakniki.
- Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan.
- Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi serta indikasi surplus devisit pangan di masing-masing daerah.
- Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi daerah untuk tahun anggaran 2025 berupa pemberian subsidi transportasi pada saat pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah.
- Terkait penyaluran BLT DD sampai dengan akhir bulan Juni 2024 sebagian besar Pemerintah Desa telah menyalurkan BLT DD ke masyarakat yang berhak menerima. Pada triwulan I Januari sampai Maret dari 119 desa BLT DD yang tersalur sudah 100%, sedangkan untuk Triwulan II bulan April sampai Juni 2025 belum ada tersalur. untuk itu pihak Dinas PMD tetap melakukan pemantauan dan tetap berupaya agar BLT DD dapat tersalur tepat waktu. Sedangkan untuk program ketahanan pangan sampai dengan bulan Juni baru sebagian kecil pemerintah desa yang melakukan eksekusi, hal ini disebabkan karena untuk program ketahanan pangan ada kaitannya dengan proses perencanaan dan rembug kelompok masyarakat.
- Dari hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, ditemukan berbagai permasalahan sebagai berikut :
  1. Belum adanya personil PPNS yang memadai untuk melakukan penindakan/penertiban dalam kegiatan pengawasan kendaraan laik jalan
  2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan angkutan / orang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan
  3. Belum adanya fasilitas yang memadai di Tempat Parkir Khusus Segenter bagi pengemudi yang melakukan parkir kendaraan
  4. Masih kurangnya fasilitas yang memadai pada lokasi terminal yang bersinggungan dengan pasar
  5. Masih kurangnya ketersediaan angkutan umum pedesaan yang melayani trayek menuju pusat perekonomian

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Agar inflasi dapat terjaga berada pada kisaran angka sesuai target Nasional, sehingga dapat menjamin dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan terus melakukan pengecekan harga harian di pasar tradisional dan terus melaporkan hasil harga pasar kepada Pemerintah Pusat melalui SP2KP.
- Agar Tim TPID semakin solid melakukan upaya pengendalian inflasi di daerah dengan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti melakukan kegiatan operasi pasar, sidak pasar, Gerakan menanam, serta penggunaan dana BTT dalam pengendalian inflasi di daerah

Agar pemanfaatan aplikasi digital seperti QRIS dan sejenisnya semakin dikembangkan sehingga dapat membantu Pemasaran produk UMKM melalui Aplikasi dan QR Code E-LAPAK SITEBEL dan QR Code E-LAPAK SITEBEL diharapkan dapat merambah hingga ke Hotel-Hotel yang berada di Lombok Barat.

- Dukungan dan perhatian Pemerintah Pusat terhadap pengendalian inflasi daerah semakin meningkat melalui pengalokasian dana, sarana dan prasarana dalam pengendalian Inflasi.
- Untuk menjaga kestabilan harga di sektor kelautan dan perikanan upaya yang dilakukan antara lain : Bantuan Bibit dan Pakan, Bantuan peralatan penangkapan, Fasilitasi pembangunan Pembuatan pakan mandiri, dan monitoring unit pengolahan ikan. Penerapan teknologi atau alat penyimpanan (cold storage) yang dapat memperpanjang masa penyimpanan produk perikanan sehingga gejolak harga dapat dikendalikan.
- Intervensi pemerintah juga dibutuhkan dalam hal penyediaan anggaran untuk mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi seperti operasi pasar murah. Subsidi harga pada saat terjadi kenaikan harga ikan.
- Mengupayakan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dapat tersalurkan tepat waktu agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
- Mengupayakan agar Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes) serta program Tanaman Pangan Lestari berjalan sesuai dengan rencana berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa di 119 desa se kabupaten Lombok Barat sesuai dengan road map.
- Memfasilitasi Masyarakat Desa agar memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Pengembangan Desa Wisata Sayur dapat segera terealisasi dengan memanfaatkan dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa yang berkoordinasi dengan dinas instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.
- Tidak meratanya harga sembilan kebutuhan (Sembako) ditengah-tengah masyarakat desa, karena dipengaruhi oleh faktor letak geografis desa masing-masing. Berdasarkan latar belakang tersebut Maka DPMD Kabupaten Lombok Barat selaku OPD yang langsung dan secara intens berhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan dengan Desa Desa Se Kab. Lobar, kembali melakukan langkah-langkah yang strategis dengan semua OPD dan Instansi Vertikal yang melakukan pelayanan melalui : “ Pemda Menyapa Desa tahun 2025 “
- Rekomendasi kebijakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat :
  1. Meningkatkan efisiensi produksi pertanian dengan memperbaiki infrastruktur pertanian, meningkatkan akses ke teknologi pertanian yang modern, dan memberikan pelatihan yang berkualitas kepada
  2. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menggalakkan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan, serta mengoptimalkan pengelolaan air dan lahan pertanian.
  3. Mendorong diversifikasi usaha pertanian dengan memberikan pelatihan kepada petani untuk mengembangkan komoditas pertanian yang beragam, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada satu komoditas saja.
  4. Memperkuat pasar pertanian dengan meningkatkan akses petani ke pasar yang lebih luas, memperbaiki infrastruktur pasaran, serta mengimplementasikan regulasi yang memungkinkan terciptanya pasar yang sehat dan berdaya saing.
  5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas stok pangan dengan mengoptimalkan regulasi impor dan ekspor, serta mendorong keberlangsungan kegiatan riset dan pengembangan pertanian.
  6. Mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang sehat dan berkelanjutan, untuk
-

mengurangi tekanan permintaan terhadap pangan dan mereduksi inflasi.

7. Mendukung pembentukan koperasi pertanian, untuk membantu petani dalam memperoleh harga yang adil dan mengurangi biaya
- Rekomendasi kebijakan pada DPMD Kab. Lombok Barat

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menekan laju inflasi

terutama di desa antara lain :

1. Mengupayakan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dapat tersalurkan tepat waktu agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
2. Mengupayakan agar Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes) serta program Tanaman Pangan Lestari berjalan sesuai dengan rencana berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa di 119 desa se kabupaten Lombok Barat.
3. Mengupayakan agar program Pengembangan Desa Wisata Sayur dapat segera terrealisasi dengan memanfaatkan dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah desa yang berkoordinasi dengan dinas instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.
- Rekomendasi kebijakan pada Dinas perhubungan Kab. Lombok Barat :

a. Perbaikan Fasilitas Pendukung di setiap tempat parkir, terminal dan Pelabuhan Pengumpan

Ketersediaan terminal maupun pelabuhan cukup penting dalam kelancaran transportasi. Untuk itu fasilitas pendukung terus ditingkatkan pada terminal di Kabupaten Lombok Barat, khususnya tempat parkir khusus angkutan barang. Pendistribusian komoditas yang efisien akan menurunkan harga jual dan dapat menekan angka inflasi. Selain didukung dengan fasilitas pendukung, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan yang lebih intensif oleh personil Dinas Perhubungan yang dilakukan di sejumlah terminal, baik pengawasan dalam penertiban parkir kendaraan maupun kegiatan bongkar muat.

b. Evaluasi jumlah jaringan trayek menuju pusat perekonomian.

Hingga saat ini, jumlah jaringan trayek di Kabupaten Lombok Barat adalah 31 jaringan. Dalam hal jaringan trayek yang menghubungkan pusat perekonomian, dari keseluruhan jaringan tersebut, hanya 75% jaringan yang tergolong aktif, 25% diantaranya masih non aktif. Artinya belum ada angkutan/moda transportasi yang beroperasi dalam trayek tersebut. Kebijakan ke depannya adalah mengaktifkan kembali koperasi angkutan khususnya pada jaringan non aktif, sehingga jumlah angkutan pedesaan mencukupi kebutuhan masyarakat dari dan menuju pusat perekonomian. Hal ini mendukung pemerintah secara tidak langsung dalam mengoptimalkan distribusi komoditas pangan utama kepada masyarakat sehingga dapat menekan angka inflasi.

c. Penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan di sepanjang jalur strategis menuju pusat perekonomian. Kondisi jalan yang mantap dan perlengkapan jalan yang berkeselamatan memberikan dampak tidak langsung berupa kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pengemudi angkutan kendaraan barang maupun pelaku

ekonomi lainnya yang berkegiatan di pasar. Mengurangi dampak kecelakaan lalu lintas sehingga distribusi berbagai komoditi utama pangan juga lancar.